

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK  
DALAM PENGGUNAAN DATA USAHA DARI  
*ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAERAH KOTA LANGSA**

**TESIS**

Oleh:

Khairul Ichsan  
NPM 221801024



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)11/7/24

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK  
DALAM PENGGUNAAN DATA USAHA DARI  
*ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAERAH KOTA LANGSA**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada  
Pascasarjana Universitas Medan Area



**Oleh:**

**Khairul Ichsan  
NPM 221801024**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)11/7/24

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PASCA SARJANA  
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul** : Implementasi Kebijakan Publik Dalam Penggunaan Data Usaha Dari *Online Single Submission (OSS)* Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa

**N a m a** : Khairul Ichsan

**NPM** : 221801024

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Dr. Budi Hartono, M.SI**



**Isnaini, SH, M.Hum, PhD**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu  
Administrasi Publik**

**Direktur**



**Dr. Beby Masitoh Batubara, MAP**



**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

**Telah diuji pada 30 Maret 2024**

---

---

**Nama : Khairul Ichsan**

**NPM : 221801024**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Syafruddin Ritonga, MAP**  
**Sekretaris : Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si**  
**Pembimbing I : Dr. Budi Hartono, M.Si**  
**Pembimbing II : Isnaini, SH, M.Hum, PhD**  
**Penguji Tamu : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, MAP**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, April 2024



Khairul Ichsan

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khairul Ichsan  
NPM : 221801024  
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Implementasi Kebijakan Publik Dalam Penggunaan Data Usaha dari *Online Single Submission (OSS)* dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

**Dibuat di Medan**

**Pada tanggal :**

Yang menyatakan



**Khairul Ichsan**

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGGUNAAN DATA USAHA DARI *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA LANGSA

Nama : Khairul Ichsan  
NPM : 221801024  
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik  
Pembimbing I : Dr. Budi Hartono, MA  
Pembimbing II : Isnaini, SH, M.Hum, PhD

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan publik dan faktor penghambat penggunaan data usaha dari *online single submission* dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa. Dengan rumusan masalah: 1) bagaimana implementasi kebijakan publik dalam penggunaan data usaha dari *online single submission* (oss) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa? Faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi kebijakan publik dalam penggunaan data usaha dari *online single submission* (oss) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa? Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan instrumen pengumpulan data observasi, studi dokumentasi dan wawancara yang diperoleh melalui informan di lapangan terdiri dari Kepala Daerah dan pejabat struktural, sedangkan analisis data yang digunakan deskriptif analisis. Teori yang digunakan untuk menganalisis kajian ini yaitu teori yang dikemukakan Edward III diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa dari sisi komunikasi, implementasi ini belum efektif karena kurangnya sosialisasi mengenai *online single submission* kepada masyarakat. Sumber daya kurang efektif, pegawai yang memiliki kompetensi belum terpenuhi, sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai. Sikap pelaksana atau disposisi dari pelaku kebijakan berjalan dengan baik, pengawasan dilaksanakan secara berjenjang, baik langsung maupun tidak langsung menggunakan sistem digitalisasi. Struktur birokrasi memenuhi kriteria dan implementasi kebijakan publik ini didukung penuh oleh Kepala Daerah. Faktor-faktor penghambat implementasi adalah sumber daya aparatur yang belum memadai, kekurangan jumlah pegawai, keahlian pegawai memerlukan sertifikasi serta kurangnya sosialisasi *online single submission* kepada masyarakat, sehingga data usaha yang diharapkan belum sepenuhnya menambah data potensi pajak/retribusi daerah.

**Kata Kunci** : Implementasi kebijakan Publik; Pajak dan Retribusi; *Online Single Submission*; Pendapatan Asli Daerah.

## ABSTRACT

### **IMPLEMENTATION OF PUBLIC POLICY IN THE USE OF BUSINESS DATA FROM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) IN INCREASING LOCAL REVENUE AT THE REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT AGENCY OF LANGSA CITY**

Name : Khairul Ichsan  
Student Number : 211801016  
Major : Master of Public Administration  
1<sup>st</sup> Advisor : Dr. Budi Hartono, M.Si  
2<sup>nd</sup> Advisor : Isnaini, SH, M.Hum, PhD

*This study aims to analyze the implementation of public policies and inhibiting factors in the use of business data from online single submission in increasing Regional Original Revenue at the Regional Financial Management Agency of Langsa City. With the formulation of the problem: 1) how is the implementation of public policy in the use of business data from online single submission (oss) in increasing local revenue at the Regional Financial Management Agency of Langsa City? What factors hinder the implementation of public policies in the use of business data from online single submission (oss) in increasing local revenue at the Regional Financial Management Agency of Langsa City? The research method used is qualitative research with data collection instruments observation, documentation study and interviews obtained through informants in the field consisting of Regional Heads and structural officials, while the data analysis used is descriptive analysis. The theory used to analyze this study is the theory put forward by Edward III including communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The results of this study show that in terms of communication, this implementation has not been effective due to the lack of socialization of online single submission to the public. Resources are less effective, employees who have competence have not been fulfilled, supporting facilities and infrastructure are not adequate. The attitude of implementers or disposition of policy actors is going well, supervision is carried out in stages, both directly and indirectly using a digitization system. The bureaucratic structure meets the criteria and the implementation of this public policy is fully supported by the Regional Head. The inhibiting factors for implementation are inadequate apparatus resources, a shortage of employees, employee expertise requires certification and a lack of socialization of online single submission to the community, so that the expected business data has not fully added to the potential regional tax/retribution data.*

**Keywords** : *Public policy implementation; Taxes and levies; Online Single Submission; Local revenue..*



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Penulis panjatkan kepada الله زعة وجلة karena dengan karunia-Nya Penulis bisa menyelesaikan penulisan Tesis ini. Shalawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, suri tauladan bagi seluruh umat Muslim di dunia. Tesis ini berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGGUNAAN DATA USAHA DARI *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA LANGSA”. Tujuan dari Tesis ini disusun untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.

Selama proses penulisan Tesis ini, begitu banyak bantuan dan dukungan yang diterima Penulis dari berbagai pihak, oleh karena itu Penulis menyampaikan ucapan terima kasih, kepada:

1. Bapak Dr. Budi Hartono, M.Si selaku dosen Pembimbing Utama, *jazakallah khairan khatsira* atas bimbingan, tambahan ilmu, serta masukan dan pengarahan dalam penulisan Tesis ini.
2. Bapak Isnaini S.H, M.Hum, PhD selaku dosen pembimbing Pendamping, *jazakallah khairan khatsira* atas bimbingan, tambahan ilmu, serta masukan dan pengarahan dalam penulisan Tesis ini.
3. Ibunda tercinta Roslinawati, terima kasih atas doa dan dukungannya.
4. Pendamping hidup, Elvi Kurniawati, SSTP, MSP yang selalu setia memberikan dukungan, cinta, dan kasih sayang untuk kesuksesan dalam karier dan rumah tangga.

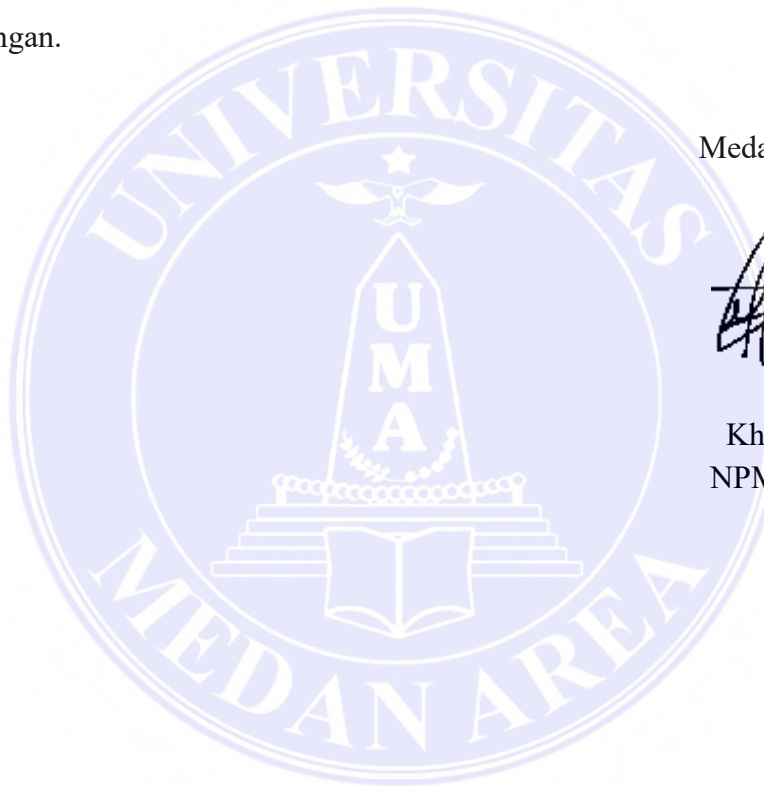
5. Anakku tersayang, Aisyah Ihsana, SiCantik dan *booster*-nya ayah.
6. Bapak Walikota Langsa beserta jajarannya yang telah mendukung penulis menyelesaikan pendidikan strata-2.
7. Dan seluruh sahabat, rekan, dan staf akademik UMA yang telah membantu penulis selama menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata Penulis menerima saran dan kritik atas penulisan tesis ini, mudah-mudahan tesis ini berguna untuk penelitian lainnya, mohon maaf atas segala kekurangan.

Medan, April 2024



Penulis  
Khairul Ichsan  
NPM 221801024



## HALAMAN MOTTO

خير سن لا هم عن أسن لل

*“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain”*  
(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Implementasi Kebijakan Publik .....	10
2.2 Pengertian Efektivitas .....	15
2.3 Pengertian <i>Online Single Submission</i> (OSS) .....	16
2.4 Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....	19
2.4.1 Komponen Pendapatan Asli Daerah .....	20
2.5 Konsep Data Usaha dari <i>Online Single Submission</i> (OSS).....	21
2.6 Penelitian Terdahulu .....	22
2.7 Kerangka Pikir Penelitian .....	26
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>29</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	29
3.2 Fokus Penelitian .....	29

3.3	Lokasi dan Situs Penelitian .....	30
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	30
3.5	Teknik Analisa Data .....	32
3.6	Definisi Konseptual dan Operasional .....	33
3.6.1	Definisi Konseptual .....	33
3.6.2	Definisi Operasional .....	34
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	37
4.1.1	Profil Kota Langsa .....	37
4.1.1.1	Sejarah Berdirinya Kota Langsa .....	37
4.1.1.2	Keadaan Geografis dan Luas Wilayah .....	37
4.1.1.3	Visi Kota Langsa .....	38
4.1.1.4	Misi Kota Langsa .....	39
4.1.1.5	Wilayah Administrasi .....	39
4.1.1.6	Keadaan Aparatur Sipil Negara .....	40
4.1.1.7	Kedaraan Perekonomian Kota Langsa .....	40
4.1.2	Profil Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa .....	44
4.1.2.1	Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa .....	44
4.1.2.2	Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa .....	45
4.1.2.3	Kedudukan Organisasi, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa .....	46
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian .....	58

4.2.1	Efektifitas Implementasi Kebijakan Publik Dalam Penggunaan Data Usaha dari Online Single Submission (OSS) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa .....	58
4.2.1.1	Komunikasi ( <i>Communication</i> ) .....	61
4.2.1.2	Sumber Daya Pelaksanaan ( <i>Resoucers</i> ) .....	62
4.2.1.3	Sikap Pelaksana ( <i>Dispotition</i> ) .....	110
4.2.1.4	Struktur Birokrasi ( <i>Bureaucratic Structure</i> ) ....	113
4.2.2	Faktor Penghambat Efektivitas Penggunaan Data Usaha dari Online Single Submission (OSS) pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa .....	116
4.2.2.1	Minimnya Sumber Daya .....	116
4.2.2.2	Minimnya Sosialisasi .....	117
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>118</b>
5.1	Kesimpulan .....	118
5.2	Saran .....	120
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	.....

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kemandirian Keuangan Daerah Kota Langsa Tahun 2021, 2023 dan 2023 .....	4
Tabel 2.1	Jenis Usaha Berdasarkan Tingkat Risiko dan Perizinan Usahanya .....	18
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu .....	23
Tabel 3.1	Informan Penelitian .....	31
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin di Kota Langsa Tahun 2023 .....	41
Tabel 4.2	Indikator Kemiskinan Kota Langsa Tahun 2022-2023 .....	43
Tabel 4.3	Target dan Realisasi PAD Tahun 2021-2023 .....	67
Tabel 4.4	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 .....	69
Tabel 4.5	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 .....	73
Tabel 4.6	Laporan Realisasi Anggaran tahun 2023 .....	76
Tabel 4.7	Besaran Pendapatan RSUD Kota Langsa dari Tahun 2021-2023 .....	77
Tabel 4.8	Besaran Pendapatan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2021-2023 di Kota Langsa .....	78
Tabel 4.9	Data Target dan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Sektor Jasa Usaha Tahun 2023 .....	83
Tabel 4.10	Data Usaha Hotel Bintang, Hotel Melati, dan Akomodasi Lainnya (homestay) yang telah diterbitkan OSS Tahun 2021-2022 .....	85
Tabel 4.11	Data Usaha Restoran, Rumah Makan dan Café yang telah diterbitkan OSS Tahun 2021-2022 .....	86
Tabel 4.12	Daftar Rekapitulasi Wajib pajak dan Objek Pajak Hotel Tahun 2022 .....	97
Tabel 4.13	Daftar Rekapitulasi Wajib pajak dan Objek Pajak tahun 2022 .....	98

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Rumus Rasio Kemandirian Keuangan Daerah .....	3
Gambar 1.2	Pola Rasio Kemandirian Keuangan Daerah .....	3
Gambar 2.1	Laman Portal <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> .....	17
Gambar 2.2	Prosedur Pengajuan Izin Usaha Pada OSS .....	19
Gambar 2.3	Tampilan Data Usaha dari Aplikasi OSS .....	21
Gambar 4.1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin di Kota Langsa Tahun 2022-2023 .....	42
Gambar 4.2	Persentase Pekerja Menurut Status Pekerjaan di Kota Langsa Tahun 2023 .....	43
Gambar 4.3	Ruang Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .....	64
Gambar 4.4	Ruang Pemrosesan Pajak dan Retribusi Daerah .....	64
Gambar 4.5	Ruang Konsultasi bagi Wajib Pajak .....	65
Gambar 4.6	Proses Pelayanan Konsultasi Pajak di Ruang Konsultasi .....	65
Gambar 4.7	Dashboard Pelaporan Data Usaha yang Diterbitkan oleh OSS .....	80
Gambar 4.8	Tampilan Laman Pengunduhan Data sebaran Proyek Berdasarkan Risiko dari OSS .....	82
Gambar 4.9	Wawancara dengan Kepala Bidang Pendapatan BPKD Kota Langsa .....	111
Gambar 4.10	Wawancara dengan Kepala DPMPTSP Kota Langsa .....	112
Gambar 4.11	Wawancara dengan Bapak Pj Walikota Langsa .....	115



## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	Kerangka Pikir Penelitian .....	27
Bagan 4.1	Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah .....	46



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah bentuk dari pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Untuk menjalankan otonomi daerah dan desentralisasi, daerah harus mempunyai sumber keuangan agar mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Sumber keuangan daerah diperoleh dari pendapatan daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah adalah sumber pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan transfer adalah pendapatan yang diperoleh dari transfer Pemerintah Pusat (dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa).

Menurut Halim (2007), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi daerah diharapkan

mampu menggali potensi sumber pendapatan asli daerah untuk menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan kewenangannya. Sumber pendapatan asli daerah yang berpotensi untuk digali adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah adalah pendapatan asli daerah yang menjadi tolok ukur kemampuan daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai perwujudan otonomi daerah dan perwujudan desentralisasi. Halim (2001) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu:

- a. kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.
- b. ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah adalah kondisi ketika pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan secara mandiri dari pendapatan asli daerah (Suhadak, Nugroho, & Wahyudi, 2007). Kemandirian keuangan daerah, menurut Halim (2013), didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah yang diperlukan. Menurut Mahmudi (2010:142), rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah

dibagi dengan jumlah pendapatan yang ditransfer dari Pemerintah Pusat dan Propinsi serta Pinjaman Daerah. Rumus kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Rumus Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman (Pendapatan Daerah)}} \times 100\%$$

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Propinsi maupun Pinjaman Daerah. Semakin besar angka rasio maka semakin tinggi kemampuan kemandirian keuangan suatu daerah dan menunjukkan bahwa semakin besar tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah. Sebaliknya, semakin kecil angka rasio maka semakin rendah kemampuan kemandirian keuangan suatu daerah dan menunjukkan kecilnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah. Tinggi dan rendahnya dapat dilihat pada pola rasio kemandirian keuangan daerah, pada gambar 1.2 berikut:

Gambar 1.2  
Pola Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25%	Instruktif
Rendah	25 – 50%	Konsultatif
Sedang	50 – 75%	Partisipatif
Tinggi	75 – 100%	Delegatif

Gambar 1.2 memperlihatkan bahwa pola hubungan *instruktif* berarti kemampuan keuangan daerah rendah sekali sebagai bentuk besarnya peranan Pemerintah Pusat daripada kemandirian pemerintah daerah. *Konsultatif* berarti kemampuan keuangan

daerah rendah yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap lebih sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah. *Partisipatif* berarti kemampuan keuangan daerah sedang, yaitu peranan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang, daerah mendekati kemampuan melaksanakan urusan otonomi daerah. *Delegatif* berarti kemampuan keuangan daerah tinggi, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Kemandirian keuangan Pemerintah Kota Langsa dapat diukur dengan membandingkan antara pendapatan asli daerah Kota Langsa dengan pendapatan daerah Kota Langsa. Kondisi tersebut dapat ditelaah dengan melihat jumlah penerimaan asli daerah dan jumlah pendapatan daerah Kota Langsa selama tiga tahun terakhir pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Kemandirian Keuangan Daerah Kota Langsa Tahun 2021, 2022 dan 2023

No	Tahun	Jumlah Pendapatan Daerah (Rp)	Jumlah PAD (Rp)	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
1.	2021	901.204.921.368,20	109.168.077.449,20	12,11	instruktif
2.	2022	859.443.603.280,93	146.281.803.543,81	17,02	instruktif
3.	2023	870.524.536.436,40	166.295.414.617,40	19,10	instruktif

Sumber: LRA BPKD Kota Langsa

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, pola hubungan kemandirian keuangan daerah di Kota Langsa adalah pola hubungan *instruktif*, artinya keuangan Pemerintah Kota Langsa masih bergantung kepada peranan Pemerintah Pusat. Akan tetapi, melihat rasio kemandirian, terjadi peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, artinya Pemerintah Kota Langsa berupaya

untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Meningkatnya pendapatan daerah tidak terlepas dari hasil pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dikutip dari buku Ekonomi Otonomi Daerah (2011) oleh Rudy Badrudin, pajak daerah merupakan kontribusi wajib ke Pendapatan Asli Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat sedangkan retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran dari jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah demi kepentingan orang pribadi atau hukum.

Berdasarkan jurnal penelitian Maulana Seinyantoro Pribadi (2018), faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian Pendapatan Asli Daerah adalah:

1. Pertumbuhan Penduduk, Pertumbuhan penduduk berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, karena dengan banyaknya penduduk dapat meningkatkan permintaan terhadap barang di pasar, banyak masyarakat yang menggunakan uang untuk membeli berbagai kebutuhan di pasar, mall, rumah makan, cafe, restoran, hotel, dan lain lain sehingga pendapat dari pemilik usaha meningkat yang berimbas kepada pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Investasi, memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dikarenakan investasi berkaitan dengan perizinan usaha dan penyerapan tenaga kerja. Perizinan usaha berhubungan erat dengan pemungutan pajak dan retribusi, sehingga dengan meningkatnya investasi, maka Pendapatan Asli Daerah seharusnya ikut bertambah.

3. Produk Domestik Regional Bruto, hal ini juga berkaitan dengan investasi. Semakin banyak pendirian usaha baru, ini, semakin menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapat masyarakat, meningkatkan daya beli serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pungutan pajak dan retribusi yang dibebankan, sehingga secara signifikan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah, kesemuanya merujuk kepada sektor perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat.

Kota Langsa dengan luas wilayah sebesar 239,83 Km<sup>2</sup>, memiliki jumlah penduduk sebanyak 192.630 jiwa, sebahagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai buruh/karyawan/pegawai. Persentase jumlah penduduk dengan mata pencaharian sebagai buruh/karyawan/pegawai sebesar 56,13 persen dari jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas, (Inkesra BPS, 2023). Berdasarkan pengamatan, di Kota Langsa banyak kegiatan perekonomian di sektor perdagangan dan jasa, sektor pendidikan, sektor pariwisata dan sektor kesehatan. Kota Langsa memiliki hutan mangrove sebagai ekowisata, Taman Hutan Kota, 2 Universitas Negeri, 1 Universitas Swasta, 3 rumah sakit swasta, 1 rumah sakit daerah dan berbagai jenis perdagangan, utamanya usaha kuliner serta penginapan.

Sejak diselenggarakannya sistem perizinan berusaha berbasis risiko atau *online single submission (oss)* oleh Pemerintah Pusat, masyarakat di Kota Langsa semakin mudah untuk melakukan kegiatan usaha. Pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko, dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa, dengan menyediakan layanan perbantuan dan memfasilitasi layanan

mandiri di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa. Perizinan berusaha berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dikelompokkan tingkatannya menjadi empat, yaitu rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi. Perizinan berusaha berbasis risiko rendah dan menengah rendah, diberikan kemudahan penerbitannya tanpa harus melengkapi persyaratan, tanpa biaya, dan waktu terbitnya dipersingkat paling cepat lima menit serta dapat diakses dimana saja selama ada perangkat seperti handphone, laptop atau komputer tersambung ke jaringan internet. Perizinan berusaha berbasis risiko menengah tinggi dan tinggi, memerlukan pemenuhan persyaratan, verifikasi dari instansi yang berwenang, dan memerlukan biaya seperti adanya PNBP. Hal ini dapat dilakukan oleh masyarakat sendiri atau melalui layanan perbantuan yang telah disediakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa. Setiap orang atau Badan Usaha yang mengajukan permohonan izin, harus memilih usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) berdasarkan sektor perizinan berusaha yang dilakukan oleh pengusaha.

Hasil pendaftaran usaha pada sistem aplikasi [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id) berupa pelaporan data usaha yang dapat diakses dan dijadikan data mentah oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa. Data usaha dari *online single submission* (oss) ini, diolah dan dimanfaatkan oleh bidang pendapatan untuk menambah data potensi pajak daerah dan retribusi daerah. Pemanfaatan data usaha ini memerlukan kerjasama dan koordinasi antara Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa.



Kerjasama ini merupakan upaya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

### 1.2 Perumusan Masalah.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan publik dalam penggunaan data usaha dari *online single submission (oss)* dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi kebijakan publik dalam penggunaan data usaha dari *online single submission (oss)* dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang:

1. Untuk menganalisa implementasi kebijakan publik dalam penggunaan data usaha dari *online single submission (oss)* dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa.
2. Untuk menganalisa faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan publik dalam penggunaan data usaha dari *online single submission (oss)* dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa.

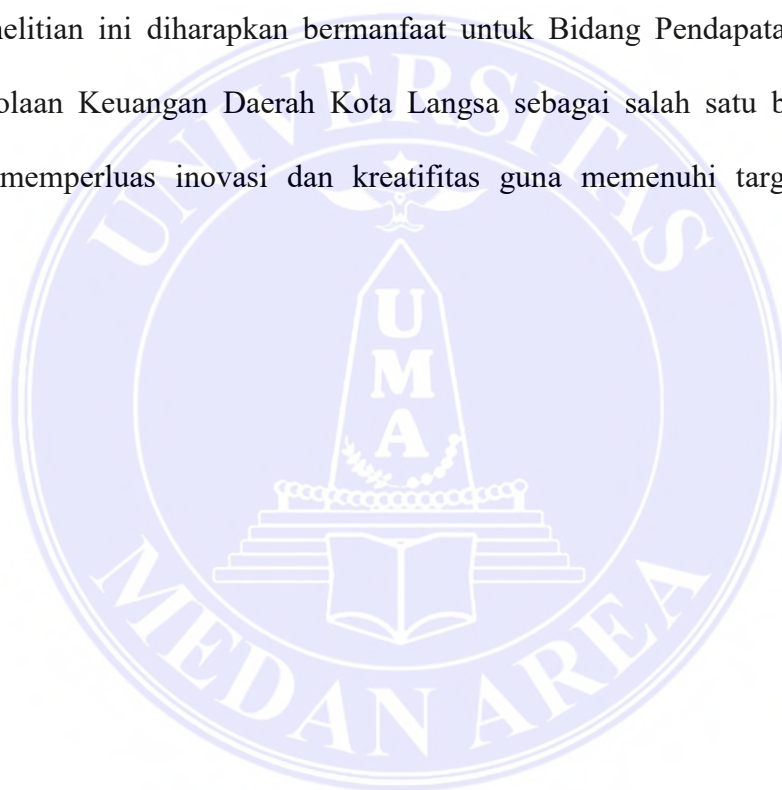
## 1.4 Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu administrasi publik yang berkaitan dengan cara meningkatkan pendapatan asli daerah bagi Pemerintah Daerah.

### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk Bidang Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa sebagai salah satu bahan referensi untuk memperluas inovasi dan kreatifitas guna memenuhi target pendapatan daerah.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Teori utama yang digunakan yaitu teori kebijakan publik untuk menganalisis bagaimana kebijakan penggunaan data usaha dari *online single submission* (oss) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa, didukung dengan teori implementasi kebijakan untuk menganalisis penerapan yang dilakukan pada penggunaan data usaha dari *online single submission* (oss) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa. Selain itu teori implementasi kebijakan digunakan untuk bagaimana efektivitas kebijakan penggunaan data usaha dari *online single submission* (oss) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa

#### 2.1 Implementasi Kebijakan Publik

Program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Hersel Nogi S. Tangkilisan (2013:9) mengutip pengertian implementasi menurut Patton dan Sawicki dalam buku yang berjudul *Kebijakan Publik yang Membumi* bahwa “Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi”.

Berdasarkan pengertian di atas, implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini

eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir. Seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan. Dunn mengistilahkan implementasi dengan lebih khusus dengan menyebutnya implementasi kebijakan (*policy implemtation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu (Dunn, 2013:132).

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari pengendalian aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu. Pendapat Riant Nugroho D. dalam bukunya yang berjudul *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Ia mengemukakan bahwa: “Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut” (Nugroho, 2014:158).

Implementasi kebijakan menurut pendapat di atas, tidak lain berkaitan dengan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan. Kebijakan publik tersebut diimplementasikan melalui bentuk program-program serta melalui turunan. Turunan yang dimaksud adalah dengan melalui proyek intervensi dan kegiatan intervensi. Menurut Darwin terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan proses implementasi yang perlu dilakukan, setidaknya terdapat empat hal

penting dalam proses implementasi kebijakan, yaitu pendayagunaan sumber, pelibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, interpretasi, manajemen program, dan penyediaan layanan dan manfaat pada publik (Widodo, 2011:194).

Persiapan proses implementasi kebijakan agar suatu kebijakan dapat mewujudkan tujuan yang diinginkan harus mendayagunakan sumber yang ada, melibatkan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, menginterpretasikan kebijakan, program yang dilaksanakan harus direncanakan dengan manajemen yang baik, dan menyediakan layanan dan manfaat pada masyarakat. Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan suatu program, Subarsono mengutip pendapat G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*, mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Kondisi lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, lingkungan tersebut mencakup lingkungan sosio cultural serta keterlibatan penerima program.
2. Hubungan antar organisasi. Implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
3. Sumber daya organisasi untuk implementasi program. Implementasi kebijakan perlu didukung sumber daya, baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non-manusia (*non human resources*).

4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Maksudnya adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi dimana semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program (Subarsono, 2015:101).

Berdasarkan faktor di atas, yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi untuk mengimplementasi program, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana merupakan hal penting dalam mempengaruhi suatu implementasi program. Sehingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kinerja dan dampak dari suatu program yaitu sejauh mana program tersebut dapat mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut teori Edward III dalam Suharsono (2012:90), ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Struktur birokrasi
4. Disposisi.

Masing-masing faktor dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan dan perintah-perintah tersebut dapat diikuti. Tentu saja, komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat.

Secara umum membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan. Transmisi artinya sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Kejelasan, jika kebijakan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk pelaksana tidak hanya harus diterima oleh para implementor, tetapi juga komunikasi kebijakan harus jelas. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal. Konsistensi, artinya bahwa jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

## 2. Sumber daya

Sumber daya adalah faktor paling penting dalam implementasi kebijakan agar efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya financial. Tanpa adanya sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

## 3. Disposisi (kecenderungan atau tingkah laku)

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

#### 4. Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang paling penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standar operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi implementor dalam bertindak. Selain itu struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Dan pada akhirnya menyebabkan aktifitas organisasi tidak fleksibel

#### 2.2 Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif, menurut kamus besar Bahasa Indonesia efektif adalah ada efeknya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna dan mulai berlaku. Menurut Sondang P. Siagian (2001:24), efektivitas adalah penggunaan sumber daya, sarana dan prasarana sampai batas tertentu yang secara sadar telah ditentukan sebelumnya untuk menghasilkan beberapa barang atas jasa yang diberikannya. Kinerja menunjukkan keberhasilan berdasarkan tercapai atau tidaknya tujuan. Jika hasil kegiatan mendekati tujuan, berarti efisiensi yang lebih besar. ketika efektivitas dilihat sebagai manajemen kerja, berarti fokusnya adalah pada pencapaian tujuan, yang ditentukan oleh penggunaan tepat waktu dari sumber daya yang tersedia, ditentukan terlebih dahulu, dan hasil yang dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut.



Menurut Beni (2016:69) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Mardiasmo (2017:134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*Output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi

Efektivitas penggunaan data usaha dari *online single submission* (oss) merupakan suatu upaya atau tindakan yang ditempuh dalam rangka menerima manfaat dari implementasi kebijakan penyelenggaraan *online single submission* (oss) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

### **2.3 Pengertian *Online Single Submission* (OSS)**

*Online single submission* (oss) adalah sebuah sistem pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Online single submission* (oss) wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB). *Online Single Submission* (oss) dapat diakses pada [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id) dimana saja selama perangkat tersambung ke internet. Aplikasi ini merupakan portal bagi setiap warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan izin usaha di seluruh wilayah Indonesia. Pada prinsipnya, sistem ini dibuat untuk memudahkan pelaku usaha menanamkan investasi di wilayah Indonesia tanpa adanya perbedaan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Sistem ini dinaungi oleh lembaga oss, diatur pedoman pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan ini memberikan kewenangan pelayanan perizinan berusaha terhadap 16 sektor urusan pemerintahan, yaitu dibidang: kelautan perikanan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, energy dan sumberdaya mineral, perindustrian, perdagangan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, transportasi, kesehatan obat dan makanan, pendidikan dan kebudayaan, pariwisata, keagamaan, pos telekomunikasi penyiaran dan sistem dan transaksi elektronik, pertahanan dan keamanan, dan ketenagakerjaan.

Gambar 2.1 Laman Portal [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id)



Sumber: [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, izin usaha diterbitkan berdasarkan jenis tingkat risiko yang dihasilkan. Tingkat risiko usaha tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Jenis Usaha Berdasarkan Tingkat Risiko dan Perizinan Usahanya

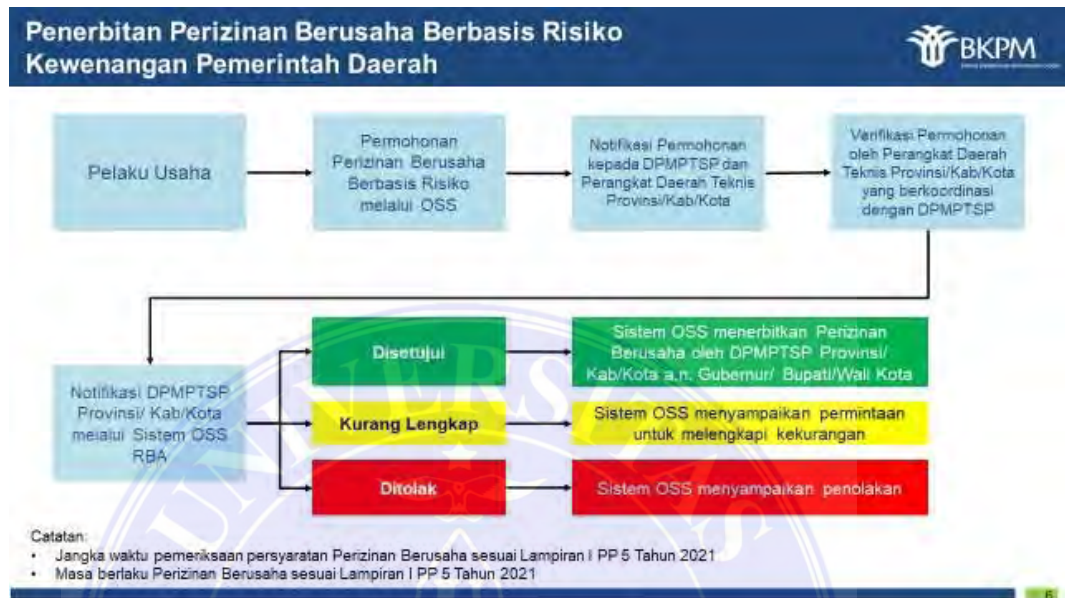
No	Jenis Usaha Berdasarkan Tingkat Risiko	Bentuk Dokumen Usaha yang Diterbitkan OSS
1.	Usaha Risiko Rendah	NIB
2.	Usaha Risiko Menengah Rendah	NIB + Sertifikat Standar (non verifikasi)
3.	Usaha Risiko Menengah Tinggi	NIB + Sertifikat Standar (terverifikasi)
4.	Usaha Risiko Tinggi	NIB + Sertifikat Standar (terverifikasi) + izin

Sumber: PP 5 Tahun 2021

NIB adalah singkatan dari Nomor Induk Berusaha. Sertifikat standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usahanya. Terdapat dua jenis sertifikat standar, yaitu sertifikat standar tanpa verifikasi dan sertifikat standar yang diverifikasi oleh Kementerian/lembaga/Daerah yang berwenang. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melakukan kegiatan usahanya. Untuk perizinan usaha dengan risiko menengah tinggi dan tinggi, permohonan perizinan berusaha terlebih dahulu dilakukan verifikasi persyaratan oleh K/L/D yang memegang kewenangan atas persetujuan perizinan berusaha yang diajukan. Verifikasi ini selain dilakukan pemeriksaan berkas pemenuhan persyaratan, juga dilakukan pemeriksaan lapangan. Proses

verifikasi perizinan berusaha oleh K/L/D dapat dilihat pada gambar 2.2 di bawah ini:

Gambar 2.2 Prosedur Pengajuan Izin Usaha Pada OSS



Sumber: DPMPPTSP Kota Langsa

Alur proses perizinan berusaha pada gambar 2.2 merupakan alur proses yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

#### 2.4 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2007), pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Bastian (2002), Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang terdiri atas pajak daerah dan retribusi daerah, pos penerimaan non pajak berupa penerimaan hasil perusahaan milik daerah, serta pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam.

### 2.4.1 Komponen Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 285, ayat 1, sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

#### 1. Pajak daerah.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### 2. Retribusi daerah.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

#### 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan meliputi bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD dan bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Swasta.

#### 4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana



Data usaha yang diunduh melalui menu pelaporan merupakan data usaha yang wilayah perizinannya berada di wilayah Kota Langsa. Data usaha yang telah diunduh, diolah menjadi database perizinan usaha berbasis risiko dengan tampilan berformat *excel*. Data Usaha ini dapat dipergunakan oleh instansi lain dengan mengajukan surat permintaan data terlebih dahulu kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Peneliti dalam melakukan penelitian ini terlebih dahulu membaca dan menelaah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti yang lain. Penelitian terdahulu diperlukan oleh peneliti sebagai bahan atau data pembanding yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penulisan penelitian ini.

Adapun beberapa penelitian yang telah dijadikan dasar oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama, Tahun	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Tesis: Manajemen Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sumba Timur (Studi Kasus Pengelolaan PAD), Orpa Hamaduna, 2015	Metode kualitatif dengan tipe deskriptif analisis	Hasil Kesimpulan Penelitian: Terdapatnya permasalahan perkembangan PAD yang mengakibatkan rendahnya PAD di Sumba Timur.
2.	Tesis: Analisis Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota BauBau, Yeyen Royani Anwar, 2012	Metode Penelitian dengan teknik deskriptif	Tingkat pengelolaan PAD pada dinas pendapatan BauBau selama tahun pengamatan dikatakan belum optimal yang terindikasikan dari rendahnya pencapaian

			PAD terhadap total penerimaan daerah.
3.	Tesis: Strategi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bangka Tengah, Cherlini, 2013.	Metode Penelitian dengan teknik deskriptif	Strategi dalam peningkatan PAD di Kabupaten Bangka Tengah berjalan cukup baik.
4.	Tesis: Analisis Efektivitas Kontribusi Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2019-2013)	Metode penelitian deskriptif	Hasil Analisis menunjukkan bahwa tahun 2010 memiliki efektivitas yang terendah (69,30%) dan tahun 2012 memiliki tingkat efektivitas yang tertinggi (136,67%), serta untuk kontribusi tahun 2009 memiliki kontribusi yang terkecil (45,21%) dan tahun 2012 memiliki kontribusi yang terbesar (72,66%). Berdasarkan hasil perhitungan analisis dan kontribusi tersebut seharusnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak guna meningkatkan pendapatan dari sektor Pajak Daerah
5.	Jurnal: Implementasi Sistem Online Single Submission Risk Basic Approach (OSS RBA) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang, Muhammad Syarif, Budi Hartono, Isnaini, 2023	Metode penelitian kualitatif (Qualitative Methods) dengan pendekatan deskriptif	Hasil penelitian menemukan bahwa dalam implementasi aplikasi, penerapannya sudah cukup baik, dari segi komunikasi yang dilakukan. Sumber daya manusia dan anggaran, belum mencukupi. Disposisi, sesuai dengan peraturan dan ketentuan pelaksanaannya serta sesuai SOP yang berlaku. Faktor penghambatnya adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sebagai pelaku usaha; Kurangnya tenaga pelaksana atau sumber daya manusia pelaksana sistem aplikasi OSS RBA;



			Sumber daya anggaran yang masih terbatas sehingga belum dapat memenuhi sarana dan prasarana layanan sistem aplikasi OSS RBA; Peraturan sering berubah sehingga menyulitkan karyawan untuk mengikuti perkembangan
6.	Jurnal: Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah, Muhammad Safar Nasir, 2019.	Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif	Hasil ini menunjukkan bahwa kontribusi dan elastisitas Sumber PAD menemukan bahwa pajak daerah, dan PAD sah lainnya adalah yang terbesar penyumbang PAD di Kabupaten Kota Indonesia sedangkan retribusi dan badan usaha masih berkontribusi dan elastisitasnya kecil, sedangkan laju pertumbuhan sumber PAD akan kecil memiliki tren laju pertumbuhan yang fluktuatif.
7.	Jurnal: Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Potensi Pertumbuhan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017- 2021, Azwar, 2021	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis share, growth, elasticity, kuadran, dan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)	Hasil penelitian menunjukkan: (1) rata-rata nilai share yang menggambarkan tingkat kemandirian kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2017-2021 adalah sebesar 16,7%. Artinya, secara umum (agregat) kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan terbilang belum sepenuhnya mandiri dalam sumber dan pengalokasian anggaran daerah; (2) secara umum,

		<p>ratarata tingkat pertumbuhan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2017-2021 adalah sebesar 2,4%. Artinya, secara umum kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan terbilang memiliki prospek dan harapan yang baik dalam pertumbuhan ekonomi karena nilai indikator growth bernilai positif; (3) pada hasil pemetaan kuadran, Kota Makassar dan Kabupaten Luwu Timur berada pada Kuadran I. Pada Kuadran II, terdapat Kabupaten Bantaeng, Soppeng, Gowa, Maros, Sidenreng Rappang, Enrekang, Luwu, Bulukumba, Parepare, Pinrang, Kepulauan Selayar, Toraja Utara, Takalar, Barru, Jeneponto, dan Sinjai, dimana hampir semuanya adalah daerah penghasil SDA. Selanjutnya, tidak ada kabupaten/kota yang masuk dalam Kuadran III. Pada Kuadran IV, beberapa kabupaten seperti Bone, Palopo, Pangkajene Kepulauan, Tana Toraja, Wajo, dan Luwu Utara masuk dalam kategori ini; (4) klasifikasi dari indeks kemampuan keuangan yang dihasilkan dari nilai indeks share, growth, dan elasticity, yaitu sebesar 0,48, dengan kategori tinggi. Dalam pola hubungan kemampuan keuangan daerah,</p>
--	--	--

			kebanyakan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki pola hubungan konsultatif, yang berarti bahwa campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan daerah dianggap sudah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah.
--	--	--	---

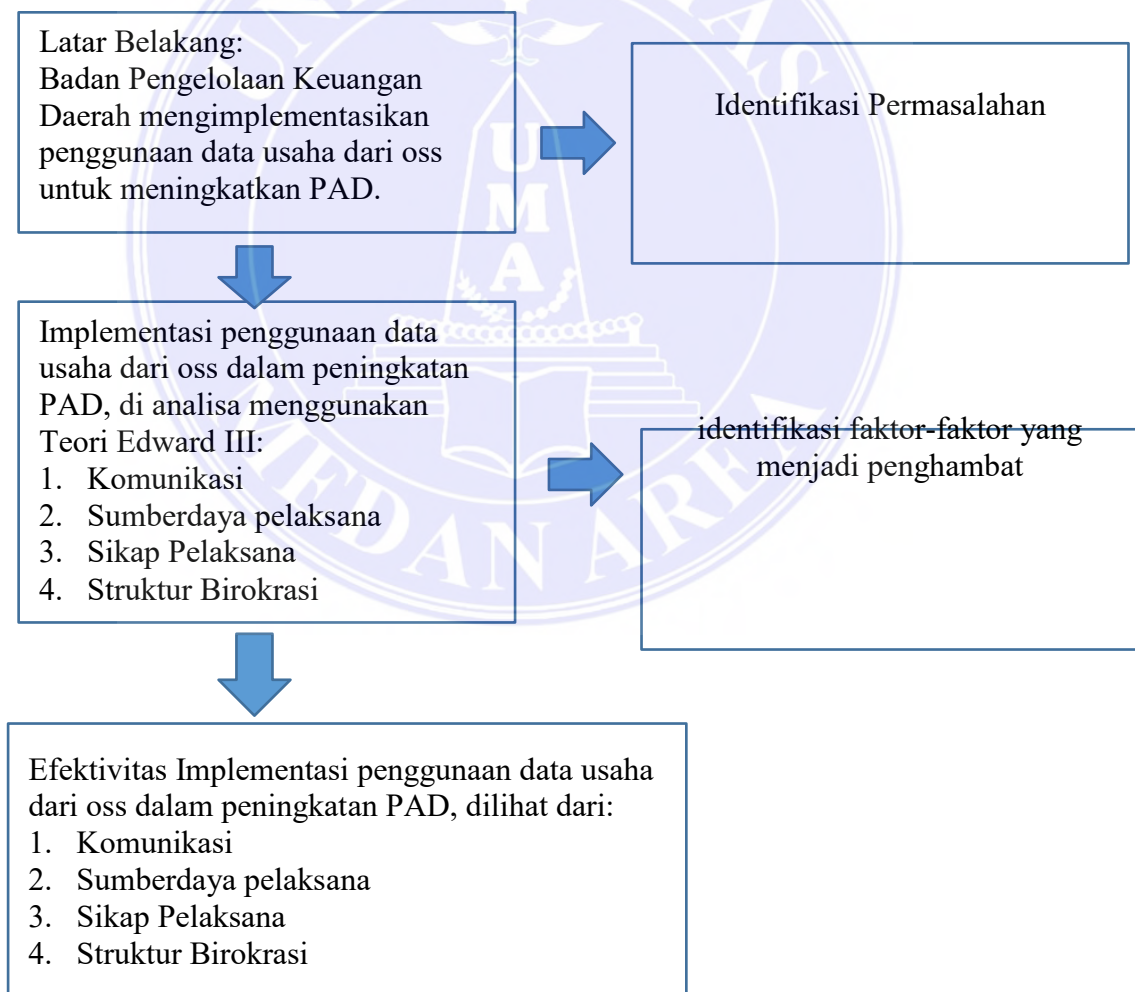
## 2.7 Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pemikiran adalah alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Di dalam penelitian kualitatif, dibutuhkan sebuah landasan yang mendasari penelitian agar penelitian lebih terarah. Oleh karena itu dibutuhkan kerangka pemikiran untuk mengembangkan konteks dan konsep penelitian lebih lanjut sehingga dapat memperjelas konteks penelitian, metodologi, serta penggunaan teori dalam penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila penelitian tersebut berkenaan atau berkaitan dengan fokus penelitian. Maksud dari kerangka berpikir sendiri adalah supaya terbentuknya suatu alur penelitian yang jelas dan dapat diterima secara akal (Sugiyono, 2017). Sebuah kerangka pemikiran bukanlah sekedar sekumpulan informasi yang di dapat dari berbagai sumber-sumber, atau juga bukan sekedar sebuah pemahaman. Tetapi, kerangka pemikiran membutuhkan lebih dari sekedar data-data atau informasi yang relevan dengan sebuah penelitian, dalam kerangka pemikiran dibutuhkan sebuah pemahaman yang didapat peneliti dari hasil pencarian sumber sumber, dan kemudian di terapkan dalam sebuah kerangka pemikiran. Pemahaman dalam sebuah kerangka pemikiran akan melandasi pemahaman lain yang telah tercipta terlebih dahulu. Kerangka pemikiran ini akhirnya akan menjadi pemahaman yang mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran lainnya.

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan di atas, maka tergambar beberapa konsep yang akan dijadikan sebagai acuan peneliti dalam

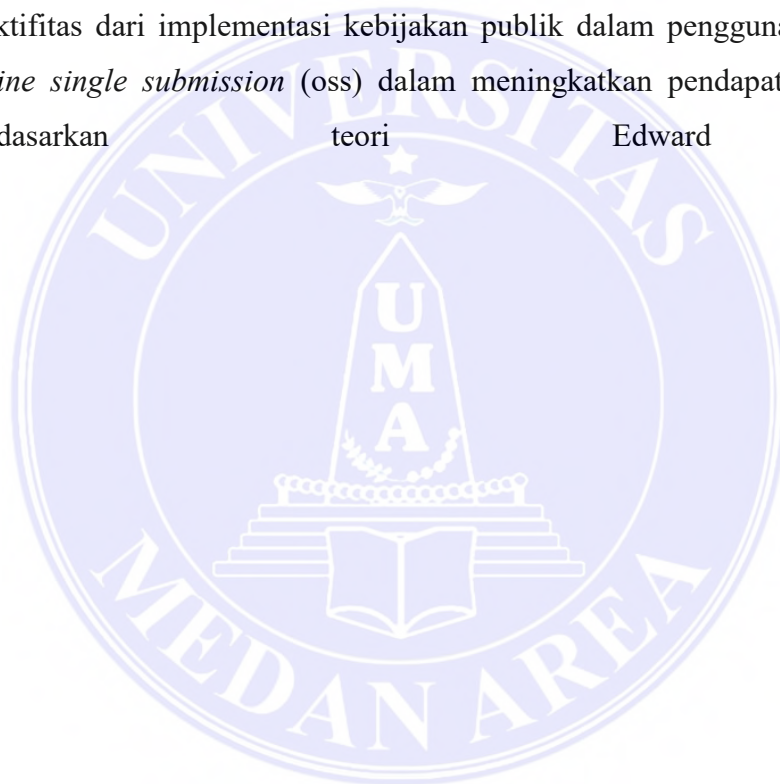
mengaplikasikan penelitian ini. Kerangka pemikiran teoritis di atas akan diterapkan dalam kerangka konseptual sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu “Implementasi Kebijakan Publik dalam Penggunaan Data Usaha dari *Online Single Submission* (OSS) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa”. Konsep yang digunakan dalam mendukung peneliti disini didasari oleh Teori Edward III bahwa implementasi kebijakan dalam hal ini penggunaan data usaha dari *online single submission* (oss) dipengaruhi oleh empat faktor penting, yaitu: komunikasi (*communication*), sumber daya pelaksanaan (*resources*), struktur birokrasi (*bureaucratic structure*), dan sikap pelaksana (*disposition*). Adapun kerangka pemikiran peneliti, dapat dilihat pada gambar 2.4 berikut:

Bagan 2.1 Kerangka Pikir Penelitian



Penjelasan bagan 2.1, berikut:

1. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang melaksanakan implementasi kebijakan publik penggunaan data usaha online single submission (oss) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
2. Peneliti melakukan identifikasi permasalahan.
3. Peneliti melakukan pengumpulan data dan menganalisisnya menggunakan teori Edward III.
4. Peneliti mengidentifikasi faktor-faktor penghambat.
5. Peneliti menguraikan hasil penelitian dan menarik kesimpulan mengenai efektifitas dari implementasi kebijakan publik dalam penggunaan data usaha *online single submission* (oss) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan teori Edward III.



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*Qualitative Methods*) dengan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai gejala atau masalah yang ada, yakni gejala menurut apa adanya pada saat penelitian ini dilakukan. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2012), metode penelitian kualitatif merupakan cara mengumpulkan deskripsi verbal atau tertulis mengenai orang-orang dan aktivitas yang bisa ditelusuri. Pendekatan ini memberikan penekanan yang sama pada latar belakang orang tersebut dan kesejahteraannya secara keseluruhan.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada instansi yang menjadi objek untuk mendapatkan data primer dan sekunder (Sugiyono, 2009). Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan peninjauan langsung ke lapangan, pada objek penelitian penggunaan data usaha dari online single submission (oss) dalam peningkatan pendapatan asli daerah, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa.

#### 3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada penggunaan data usaha dari *online single submission* (oss) oleh bidang pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa untuk dijadikan data potensi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

### 3.3 Lokasi Dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Langsa dengan situs penelitiannya adalah dua satuan perangkat daerah Kota Langsa, yaitu:

1. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa, beralamat di Jalan A. Yani Nomor 18A Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa Propinsi Aceh.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa beralamat di Jalan Panglima Polem Nomor 41 Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa Propinsi Aceh.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah Penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data antara lain: wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Wawancara penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari satu sisi saja sehingga hubungan asimetris harus tampak. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan, pertanyaan diajukan kepada informan yang diinginkan oleh peneliti yang berkaitan dengan data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian.
2. Observasi atau pengamatan adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya (Hadi, 2000). Penelitian dilakukan dengan cara melakukan pengamatan lapangan pada ruang kerja Bidang Pendapatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa.

3. Dokumentasi, menurut Sugiyono (2009) bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari dari penggunaan metode observasi dan wawancara, hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen.

Jenis data penelitian berkaitan dengan sumber data dan pemilihan metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh data penelitian. Menurut Bungin (2013) data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber yang diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data sekunder adalah data yang berhubungan dengan informasi dari sumber yang telah ada sebelumnya seperti dokumen-dokumen penting, situs web, buku, dan sebagainya.

Data primer diperoleh dari wawancara informan. Menurut Suyatno (2010), ada tiga macam informan penelitian: 1). Informan kunci yakni mereka yang memiliki pengetahuan tentang dan memiliki akses ke berbagai data fundamental; 2). Informan utama ialah mereka yang berpartisipasi aktif dalam interaksi sosial yang diteliti; dan 3). Informan tambahan yaitu mereka yang dapat menawarkan data meskipun tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial yang sedang dipelajari. Adapun dalam penelitian ini, para informan yang ditunjuk oleh peneliti adalah:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan	Nama	Keterangan
1.	Kunci	Fachrurrozi, SE	Kepala Bidang Pendapatan BPKD
2.	Utama	Rusli Jufri, S.Sos.I	Kepala DPMPTSP
3.	Utama	Edy Zulfani, SE	Kepala Bidang PTSP
4.	Utama	Ferial Riza Aulia, SSTP, MAP	Kasubbid Pendapatan BPKD
5.	Tambahan	Syaridin, S.Pd, M.Pd	Pj. Walikota Langsa

Sumber: Peneliti.



### 3.5 Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif. Teknik analisis data deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis analisis data deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara kemudian menyajikan data yang telah dikumpulkan dan menganalisisnya secara deskriptif. Menurut Miles dan Huberman (1992:10), langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam menganalisa data kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data.

Dalam hal ini Peneliti melakukan pengumpulan data penelitian berupa hasil wawancara, observasi serta dokumentasi di lapangan secara obyektif.

2. Reduksi data.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2008). Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek kualitatif berlangsung sampai laporan tersusun (Milles dan Huberman, 1992)

3. Penyajian Data.

Alur yang paling penting selanjutnya dari analisis data adalah penyajian data.

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles dan Hubberman, 1992).

#### 4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Adapun yang dimaksud dengan verifikasi data adalah usaha untuk mencari, menguji, mengecek kembali atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur, sebab-akibat, atau preposisi. Sedangkan Kesimpulan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2008).

### 3.6 Definisi Konseptual dan Operasional

#### 3.6.1 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah penjelasan tentang hal-hal yang dibahas dalam penelitian untuk membantu pemahaman. Definisi konseptual penelitian ini ialah:

- a. Implementasi adalah pelaksanaan suatu tindakan atau kegiatan yang bertujuan untuk menangani suatu persoalan atau mengubah sebuah kondisi menjadi seperti yang diharapkan, yang pelaksanaannya diatur peraturan dan dilakukan oleh sejumlah pelaksana pada lingkungan tertentu. Implementasi dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan publik dalam penggunaan data usaha dari online single submission (oss) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa.
- b. Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.
- c. *Online single submission* adalah sistem perizinan berbasis teknologi informasi

yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha di dalam negeri.

- d. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

### 3.6.2 Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian. Definisi operasional penelitian ini ialah sebagai berikut.

- a. Komunikasi, yakni interaksi berkesinambungan yang dilakukan di dalam maupun luar organisasi untuk menyebarkan informasi dan menyelaraskan pemahaman para pelaksana tentang tujuan, maksud, dan sasaran dalam implementasi kebijakan. Dengan komunikasi, pelaksana dan para pemangku kepentingan dapat mengetahui informasi dan isi kebijakan yang hendak diterapkan. Tiga hal utama dalam aspek komunikasi ialah:
  1. Transmisi, penyampaian informasi secara merata kepada para pelaksana dan pemangku kepentingan agar semua pihak mengetahui kebijakan yang di implementasikan.
  2. Kejelasan, yakni kejelasan, kebenaran dan kesesuaian informasi tentang implementasi kebijakan yang diberikan kepada pelaksana dan para pemangku kepentingan sehingga para aktor terlibat dapat dengan jelas memahami apa yang harus dan tidak harus dilakukan sesuai dengan perannya masing-masing.
  3. Konsistensi, yakni ketegasan dan konsistensi penyampaian informasi

implementasi kebijakan. Konsistensi menyeragamkan pemahaman pelaksanaan pemangku kepentingan dan meminimalisir ambiguitas atau kerancuan.

4. Sumber daya, yakni segala sesuatu yang diperlukan agar program atau aktivitas implementasi kebijakan dapat terealisasi dan berdampak seperti apa yang diharapkan. Sumber daya implementasi kebijakan melingkupi sumber daya manusia, informasi, dana, otoritas dan fasilitas
- b. Disposisi, ialah karakteristik dan perilaku pelaksana atau aktor kebijakan. Disposisi mempengaruhi cara bersikap dan pemahaman pelaksana dan para pemangku kepentingan akan tujuan implementasi kebijakan. Apabila pelaksana pro kebijakan, maka implementasi kebijakan kemungkinan tidak menghadapi terlalu banyak hambatan. Namun, jika pelaksana tidak sependapat dengan pembuat kebijakan atau menolak kebijakan, maka implementasi akan agak lebih sulit akibat kecenderungan rentan konflik atau pertentangan
  - c. Struktur birokrasi berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan yang lazimnya dilaksanakan oleh organisasi pemerintah berbentuk birokrasi. Organisasi birokrasi memiliki struktur berlapis dengan kerangka kerja berbentuk piramida, yang jalinan komando dijalankan dari atas ke bawah dan terdapat pembagian tugas, fungsi, serta wewenang secara jelas dalam pelaksanaan pekerjaan. Dalam birokrasi, ada dua hal yang perlu diperhatikan, diantaranya:
    1. SOP atau *Standard Operating Procedure*, yaitu tata cara pelaksanaan serangkaian kegiatan yang mengarahkan tindakan dan perbuatan para pelaksana di organisasi. SOP menggambarkan tata aliran pekerjaan yang dipraktikkan di organisasi. Setiap organisasi pemerintah mungkin memiliki

perbedaan dan persamaan SOP, tergantung pada situasi, kondisi lingkungan dan kebijakan yang ada.

2. Fragmentasi, yakni pemisahan atau pendistribusian tanggung jawab dan atau wewenang atas implementasi kebijakan kepada para aktor terkait, dimana fragmentasi dapat menghambat implementasi suatu kebijakan apabila para pelaksana tidak melakukan kerja sama dan koordinasi



## BAB V

### PENUTUP

#### 1.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa penelitian yang telah diuraikan melalui pembahasan pada bab sebelumnya, merujuk kepada Edward III, peneliti menyimpulkan implementasi kebijakan publik dalam penggunaan data usaha dari *online single submission* (oss) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa, berdasarkan faktor komunikasi (*communication*), sumber daya pelaksanaan (*resources*), sikap pelaksana (*disposition*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) sebagai berikut:

1. Faktor komunikasi (*communication*).

Faktor ini kurang efektif karena minimnya komunikasi melalui sosialisasi atas aplikasi oss.go.id ke masyarakat menyebabkan tidak maksimalnya pelaku usaha yang mendaftarkan usahanya sehingga data usaha yang diterbitkan dari *online single submission* (oss) tidak menambah data potensi atau tidak terdapat dalam data potensi pajak/retribusi

2. Faktor sumber daya pelaksanaan (*resources*).

Faktor ini kurang efektif karena dikarenakan minimnya sumber daya aparatur baik personil pada bidang pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa maupun personil pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa. Personil untuk mengolah data usaha menjadi data potensi pajak/retribusi, masih sangat minim karena data usaha dari *online single submission* (oss) yang di akses melalui dashboard aplikasi oss.go.id, masih berupa data mentah yang belum

disurvei lapangan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa. Pengolahan data usaha memerlukan waktu, kemampuan personil, dan anggaran yang memadai untuk dijadikan menjadi data potensi pajak/retribusi.

3. Faktor sikap pelaksana (*disposition*).

Dari hasil penelitian, faktor ini menunjukkan efektifitas yang baik. Pegawai di bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah diberikan arahan dari pimpinan yaitu kepala bidang pendapatan dan kepala Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu untuk melaksanakan tugas sesuai dengan sasaran penilaian kinerja yang terukur melalui penilaian e-kin dengan mengacu kepada analisis beban kerja. Pemahaman kerjasama kedua instansi yang disampaikan kepada pegawai berkenaan dengan sikap kepatuhan untuk mengimplementasikan tindak lanjut atas atensi MCP-KPK dalam upaya pencegahan korupsi pemerintahan daerah area optimalisasi pajak.

4. Faktor struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

Kunci utama dalam penelitian ini adalah sikap pimpinan daerah, yaitu Walikota Langsa terhadap implementasi kebijakan public dalam penggunaan data usaha dari online single submission (oss) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Dukungan yang diberikan agar kerjasama antara kedua instansi menghasilkan optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah. Artinya faktor ini menggambarkan efektifitas yang baik.

## 1.2 . SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran, yaitu:

1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa menyusun kebutuhan pegawai untuk memenuhi kebutuhan organisasi khususnya pegawai di bidang pendapatan.
2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa perlu melakukan peningkatan kapasitas sumber daya yaitu pegawai bidang pendapatan untuk memiliki sertifikasi di bidang pajak/retribusi daerah yang dibutuhkan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah Kota Langsa.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa perlu bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mensosialisasikan pendaftaran usaha melalui [oss.go.id](http://oss.go.id) sehingga data usaha dari *online single submission* (oss) dapat menambah data potensi pajak dan retribusi daerah.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdussamad, Zuchri, 2021. Metode Penelitian Kualitatif, Makassar. CV. Syakir Media Press
- Badan Pusat Statistik, 2021. Kota Langsa Dalam Angka, Langsa Municipality In Figures.
- Badan Pusat Statistik, 2023. INKESRA, Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kota Langsa, Langsa.
- Badrudin, Rudy, 2011. Ekonomika Otonomi Daerah, Jakarta. UPP STIM YKPN
- Bappeda Kota Langsa, 2021. Rencana Kerja Pemerintah Kota, Langsa.
- Halim, Abdul, 2001. Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta. Salemba
- Hartanto, F.M. 1996. Kepemimpinan Sinergistik: Membangun Keunggulan Melalui Kerjasama dan Aliansi Strategik. Studio Manajemen Jurusan Teknik Industri Institut Teknologi Bandung. Bandung, 2-6
- Mahmudi, 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Jakarta. STIE YKPN
- Soekanto, Soejono. 2012. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta. PT Raja Grafindo. Persada
- Sugiyono, 2022. Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta. Alfabeta Bandung

### Jurnal dan Sumber Lainnya

- Azwar, 2021. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Potensi Pertumbuhan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021, Jurnal Manajemen Keuangan Publik. Makassar.
- Maulana Sieyantoro Pribadi, 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Propinsi Kalimantan Timur
- Muhammad Syarif, Budi Hartono, Isnaini, 2023. Implementasi Sistem Online Single Submission Risk Basic Approach (OSS RBA) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang, Jurnal, UMA. Medan
- Muhammad Safar Nasir, 2019. Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Undip. Semarang

### Internet

<https://pemerintahan.langsakota.go.id/web-gampong/>

<https://www.langsakota.go.id/visi-misi#>

<https://organisasi.langsakota.go.id/halaman/detail/daftar-perangkat-daerah>

<https://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan-george-edward-iii/>

<https://www.kajianpustaka.com/2020/04/keuangan-daerah-definisi-prinsip-dan-rasio.html>

<https://langsakota.bps.go.id/publication/2023/12/22/63313f963bf92b5703f75a71/inkesra--indikator-kesejahteraan-rakyat--kota-langsa-2023.html>

<https://pemrosesan.oss.go.id/#/dashboard>

### **Peraturan**

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Jakarta

Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa

Peraturan Walikota Langsa Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa

Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa

Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa